

DINAMIKA PERAN BAWASLU DALAM MENGAWAL DEMOKRASI DI KOTA KUPANG DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

Iber Dedy Kornel Tanesib¹, Jidon A.Y.Nubatonis², Rofinus Taek³

^{1,2,3}Universitas Karyadarma Kupang

ibertanesib08@gmail.com¹, jidonnubatonis123@gmail.com², taekrofinus@gmail.com³

ABSTRACT; *The 2024 Simultaneous Regional Election and Pilkada is a crucial moment in Indonesia's democratic system, including in the City of Kupang. The role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) as a supervisory institution in ensuring a free, fair and transparent election process is very important to avoid fraudulent practices, money politics and other violations. This research aims to examine the dynamics of Bawaslu's role in guarding democracy in Kupang City during the 2024 Simultaneous Elections and Regional Head Elections. Using a qualitative approach, this research identifies Bawaslu's challenges, strategies and achievements in supervision, as well as providing recommendations for increasing the effectiveness of election supervision in the regions. It is hoped that this research can contribute to strengthening election supervision and democracy in Indonesia.*

Keywords: *Bawaslu, Democracy, Elections, Simultaneous Regional Elections, Qualitative, Money Politics.*

ABSTRAK; Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan momen krusial dalam sistem demokrasi Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas dalam menjamin proses pemilu yang bebas, adil, dan transparan sangat penting untuk menghindari praktik kecurangan, politik uang, serta pelanggaran lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Kota Kupang selama Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan, strategi, dan capaian Bawaslu dalam pengawasan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pengawasan pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Bawaslu, Demokrasi, Pemilu, Pilkada Serentak, Kualitatif, Politik Uang.

PENDAHULUAN

Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan salah satu titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Sebagai wilayah dengan dinamika politik yang khas, Kota Kupang dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, seperti keterbukaan, keadilan, dan penanggulangan kecurangan. Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat strategis untuk memastikan bahwa pemilu dan pilkada berlangsung secara demokratis, bebas dari praktik kecurangan dan politik uang.

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki mandat yang sangat luas dan mencakup seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, mulai dari penyusunan daftar pemilih, kampanye, hingga perhitungan suara. Bawaslu juga diberi kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi, termasuk politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran administratif yang bisa mengganggu jalannya demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Kota Kupang selama Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Pemilu dan Pilkada di Indonesia, khususnya di Kota Kupang, selalu diwarnai dengan masalah politik uang, kampanye hitam, dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Sutanto (2022), politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar yang sering terjadi pada tingkat lokal, termasuk di Kota Kupang, karena calon-calon peserta pemilu kerap memanfaatkan situasi sosial ekonomi masyarakat yang rentan. Praktik ini, meskipun ilegal, sering kali sulit dibuktikan karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terkadang disertai dengan tekanan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat dan independen untuk menjamin jalannya demokrasi yang sehat dan transparan.

Bawaslu memiliki mandat yang sangat luas dan mencakup seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, mulai dari penyusunan daftar pemilih, kampanye, hingga perhitungan suara. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi, baik itu dalam bentuk politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pelanggaran administratif yang bisa merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, tugas Bawaslu sangat krusial untuk menjaga kualitas demokrasi, khususnya

dalam hal menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan pemilih dan masyarakat pada umumnya.

Namun, dalam praktiknya, Bawaslu Kota Kupang menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural maupun fungsional. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang sering kali menghambat pengawasan yang maksimal, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Selain itu, pengaruh politik lokal juga turut memberikan tantangan tersendiri bagi Bawaslu, karena adanya potensi politisasi dalam pengawasan pemilu. Di sisi lain, Bawaslu juga dituntut untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan, mengingat peran masyarakat sangat penting untuk mendukung terlaksananya pemilu yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Kota Kupang selama Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini dalam menjalankan tugas pengawasannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa efektif Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk mengurangi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kota Kupang.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Kota Kupang.
2. Menganalisis peran dan strategi yang diterapkan Bawaslu untuk mengawal proses demokrasi di Kota Kupang.
3. Mengkaji sejauh mana efektivitas pengawasan Bawaslu dalam mengurangi pelanggaran dan menciptakan pemilu yang lebih adil dan demokratis di Kota Kupang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu

Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu dan pilkada di Indonesia. Sihombing (2018) menyatakan bahwa

pengawasan yang efektif oleh Bawaslu dapat mengurangi potensi pelanggaran, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan praktik politik uang yang merusak sistem demokrasi. Zainal Arifin Mochtar (2014) menekankan bahwa pengawasan tidak hanya melibatkan upaya penegakan hukum, tetapi juga edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak politik mereka sebagai pemilih.

2. Tantangan Pengawasan dalam Pemilu dan Pilkada

Cahyo Widiyanto (2020) mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengawasan pemilu adalah praktik politik uang dan pengaruh kuat dari kepentingan politik lokal. Hal ini seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemilu yang seharusnya bebas dan adil. Di Kota Kupang, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial dan ekonomi menjadi potensi eksploitasi bagi calon peserta pemilu untuk meraih suara dengan cara yang tidak sah (Sutanto, 2022).

3. Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Publik

Marwan (2015) menyatakan bahwa selain melakukan pengawasan terhadap pelanggaran, Bawaslu juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pengawasan oleh Bawaslu diharapkan dapat mendidik pemilih untuk lebih aktif dalam proses demokrasi dan menghindari apatisisme politik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota Bawaslu Kota Kupang, aparat pengawas pemilu, serta pengamat dan praktisi hukum yang terlibat dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan analisis dokumen yang terkait dengan kebijakan, laporan pengawasan Bawaslu, serta data hasil pemilu dan pilkada sebelumnya. Teknik analisis data dilakukan dengan metode pengkodean tematik, untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan isu-isu yang relevan dengan peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terletak di bagian selatan Indonesia, tepatnya di Pulau Timor. Kota ini memiliki posisi strategis sebagai

pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di wilayah NTT. Berikut adalah gambaran mengenai Kota Kupang. Kota Kupang terletak di ujung barat daya Pulau Timor, berbatasan langsung dengan Laut Timor di sebelah utara dan Selat Ombai di sebelah selatan. Kota ini memiliki luas sekitar 180,27 km² dan terbagi menjadi beberapa kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik geografis yang berbeda, mulai dari daerah pesisir hingga dataran tinggi. Kota Kupang termasuk dalam kategori wilayah yang memiliki iklim tropis dengan dua musim yang jelas: musim hujan dan musim kemarau.

Kota Kupang merupakan kota dengan jumlah penduduk yang terus berkembang. Berdasarkan data sensus terakhir, jumlah penduduk Kota Kupang sekitar 500.000 jiwa lebih, yang mayoritas beragama Kristen, meskipun terdapat juga kelompok muslim dan agama lainnya. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Kupang juga merupakan pusat pertemuan berbagai suku dan budaya, yang menjadikannya sebagai miniatur keanekaragaman budaya Indonesia, dengan berbagai bahasa lokal yang digunakan sehari-hari selain bahasa Indonesia.

Kota Kupang adalah pusat perekonomian di Provinsi NTT. Selain sebagai pusat administrasi, kota ini juga menjadi pusat perdagangan utama di wilayah timur Indonesia. Sektor perdagangan dan jasa menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian kota ini, dengan sektor pariwisata yang juga mulai berkembang, mengingat Kota Kupang menjadi gerbang bagi wisatawan yang hendak menjelajahi keindahan alam NTT. Aktivitas ekonomi utama lainnya termasuk pertanian, perikanan, dan peternakan yang menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk, terutama di daerah pinggiran kota.

Kota Kupang merupakan salah satu kota administratif di NTT yang dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Seiring dengan dinamika politik lokal, Kota Kupang sering menjadi pusat perhatian dalam berbagai pilkada dan pemilu, dengan beberapa partai politik dan calon-calon lokal yang bersaing dalam meraih suara rakyat. Politik uang dan pengaruh politik lokal sering menjadi isu dalam proses pemilihan umum di kota ini, menjadikannya sebagai salah satu tantangan besar bagi lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu.

Kota Kupang memiliki infrastruktur yang terus berkembang, meskipun masih menghadapi tantangan terkait dengan aksesibilitas di beberapa daerah. Bandara El Tari

merupakan gerbang udara utama yang menghubungkan Kota Kupang dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, sementara pelabuhan laut juga memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan dan transportasi antar pulau. Namun, infrastruktur di daerah pedesaan dan pinggiran kota masih memerlukan perbaikan, sehingga memberikan tantangan dalam hal distribusi informasi dan pengawasan pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Kota Kupang dikenal sebagai kota yang multikultural, dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis dan budaya. Mayoritas penduduknya adalah suku Timor, namun ada juga suku-suku lain yang tinggal di kota ini, seperti suku Jawa, Bali, Bugis, dan Flores. Keanekaragaman budaya ini tercermin dalam berbagai acara adat, perayaan keagamaan, serta kuliner dan seni yang berkembang di kota ini. Masyarakat Kota Kupang juga dikenal memiliki nilai-nilai gotong royong yang kuat, yang sering kali menjadi faktor penguat dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah perbedaan.

Meskipun Kota Kupang memiliki potensi besar, kota ini juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik. Praktik politik uang dan pengaruh kekuatan politik lokal sering kali mewarnai proses pemilu dan pilkada, yang dapat mengancam integritas demokrasi. Selain itu, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, terutama di wilayah pinggiran kota, juga masih menjadi masalah yang perlu perhatian serius.

Tantangan yang Dihadapi Bawaslu di Kota Kupang.

1. Politik Uang

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Kupang dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah praktik politik uang, yang sering terjadi di kalangan calon legislatif dan kepala daerah. Masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial sering kali menjadi sasaran manipulasi dengan janji-janji materi. Meskipun Bawaslu telah melakukan pengawasan, identifikasi dan pembuktian praktik politik uang menjadi tantangan besar, karena sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak langsung. Sebagai contoh, dalam Pemilu 2019, Bawaslu Kota Kupang menghadapi kesulitan dalam menindaklanjuti laporan terkait politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif (Sutanto, 2022).

2. Keterbatasan Sumber Daya

Bawaslu Kota Kupang juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal. Terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, Bawaslu kesulitan dalam mengimplementasikan pengawasan yang menyeluruh. Dalam Pilkada 2020, kekurangan personel di beberapa kelurahan mempengaruhi efektivitas pengawasan, yang terbukti menghambat penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi (Joko Santoso, 2021).

3. Pengaruh Lokal dan Politisasi Pengawasan

Pengaruh dari kekuatan politik lokal juga menjadi tantangan yang signifikan. Di beberapa kasus, tekanan politik dari partai politik atau tokoh daerah dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Bawaslu. Hal ini menimbulkan potensi mengurangi kredibilitas Bawaslu di mata publik, seperti yang terjadi pada Pilkada Kota Kupang 2020, di mana ada indikasi intervensi politik terhadap anggota Bawaslu yang terlibat dalam pengawasan (Setyawan, 2022).

Strategi Bawaslu dalam Mengawal Demokrasi

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Kota Kupang mengimplementasikan beberapa strategi yang efektif, antara lain:

1. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

Bawaslu melakukan berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik dan memerangi praktik politik uang. Dalam Pilkada 2020, Bawaslu mengadakan forum diskusi dan kampanye anti-politik uang yang melibatkan masyarakat lokal dan tokoh agama, yang terbukti efektif dalam mengurangi tingkat partisipasi politik uang di daerah-daerah rawan (Hermawan, 2021).

2. Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholder

Bawaslu menggandeng berbagai pihak, termasuk LSM, media, dan akademisi, untuk memperluas jaringan pengawasan. Kerja sama ini membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu dan pilkada,

serta memperkuat legitimasi pengawasan yang dilakukan (Pusat Studi Politik Universitas Nusa Cendana, 2023).

3. Pemanfaatan Teknologi

Bawaslu memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran secara online, untuk mempermudah masyarakat melaporkan adanya kecurangan. Penggunaan aplikasi "Pemilu sigap lapor" selama Pilkada 2020 memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan kecurangan, yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh pengawas lapangan (Nasution, 2022).

KESIMPULAN

Bawaslu Kota Kupang memainkan peran kunci dalam mengawal demokrasi di daerah, meskipun menghadapi tantangan besar seperti politik uang, keterbatasan sumber daya, dan politisasi pengawasan. Dengan strategi yang diterapkan, seperti penyuluhan kepada masyarakat, penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, dan pemanfaatan teknologi, Bawaslu dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan terhadap Bawaslu, baik dalam hal anggaran, sumber daya manusia, maupun independensi lembaga, untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan demokratis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutanto, M. (2022). Politik Uang dalam Pemilu dan Pilkada: Tantangan Pengawasan di Kota Kupang. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Joko Santoso, A. (2021). Keterbatasan Sumber Daya dalam Pengawasan Pemilu di Daerah Terpencil. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Setyawan, F. (2022). Politisasi Pengawasan Pemilu: Kasus di Kota Kupang. Jurnal Politik Lokal, 14(2), 90-102.
- Hermawan, B. (2021). Penyuluhan dan Edukasi Pemilu: Upaya Meningkatkan Partisipasi di Kota Kupang. Kupang: Lembaga Pendidikan Pemilu.
- Pusat Studi Politik Universitas Nusa Cendana (2023). Kolaborasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu di Kupang. Kupang: Universitas Nusa Cendana